



Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pengembangan Kapasitas Kelompok Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat

Theodora Jaung^{1*}, Ambara Saraswati Mardani², Gallex Simbolon³, Nirwaning Makleat⁴, Ahmad Hamdan⁵

^{1,2,3,4}Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Jl. Matani Raya, Lasiana, Kec. Klp. Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

⁵Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

Jl. Siliwangi No. 24, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

*Email: jaungtheodora333@gmail.com

Received: 13 January 2026; Revised: 15 February 2026; Accepted: 27 March 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendamping PKH dalam pengembangan kapasitas Kelompok Pemberdayaan KPM di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan penelitian terdiri atas 1 orang pendamping PKH sebagai informan utama dan 15 anggota Kelompok Pemberdayaan KPM sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, edukator, representatif, dan teknikal. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, pembentukan Usaha Bersama Simpan Pinjam, pelatihan berbasis potensi lokal, pemberian motivasi, akses terhadap sumber daya eksternal, serta pendampingan administrasi dan pengelolaan kelompok. Anggota KPM merasakan pendampingan berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, kerja sama, dan kemandirian ekonomi anggota kelompok. Adapun dukungan/hambatan yang dialami pendamping dalam menjalankan perannya dalam peningkatan kapasitas.

Kata Kunci: kelompok pemberdayaan, keluarga penerima manfaat, pengembangan kapasitas, pendamping PKH

The Role of Family Hope Program Facilitators in the Capacity Building for Beneficiary Family Empowerment Groups

Abstract

This study aimed to examine the role of PKH facilitators in developing the capacity of KPM Empowerment Groups in Liang Bua Village, Rahong Utara District, Manggarai Regency. A qualitative approach with a case study design was employed. Informants consisted of one PKH facilitator as the main informant and 15 KPM Empowerment Group members as supporting informants. Data were collected through observation, interviews, documentation and analyzed using the Miles and Huberman model. Data validity was established through source and technique triangulation. Findings showed that the PKH facilitator performed four roles: facilitator, educator, representative, and technician. These roles were implemented through Family Capacity Building Meetings, a Joint Savings and Loan Business, local-potential-based training, motivation, access to external resources, and assistance in administration and group management. The facilitation improved members' knowledge, skills, self-confidence, cooperation, and economic independence. The study also identified supporting factors and obstacles encountered by facilitator in developing the group's capacity.

Keywords: Beneficiary Families, Capacity Building, Empowerment Group, PKH Facilitator

How to Cite: Jaung, T., dkk. (2026). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pengembangan Kapasitas Kelompok Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat.

Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. 10(1). 94-106. doi:

<https://doi.org/10.21831/diklus.v10i1.101637>



PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, sumber daya ekonomi, dan kemampuan mengambil keputusan. Program Keluarga Harapan (PKH) dikembangkan sebagai salah satu program perlindungan sosial untuk membantu keluarga miskin dan rentan sekaligus mendorong perubahan perilaku dan kemandirian. Dalam kerangka tersebut, pemberdayaan menjadi bagian penting karena keberhasilan PKH tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari berkembangnya kemampuan keluarga penerima manfaat.

Di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, PKH tidak hanya dilaksanakan sebagai bantuan sosial, tetapi juga dikembangkan melalui kelompok pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2025 terdapat 311 KPM yang dikelompokkan ke dalam lima kelompok pemberdayaan dengan jumlah anggota sekitar 20–30 orang. Kegiatan kelompok meliputi arisan bulanan, Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP), E-Warung sembako, usaha kuliner lokal, dan kegiatan pertanian. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, partisipasi, dan perekonomian anggota secara individu maupun kelompok. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan pengetahuan pengelolaan kelompok, perbedaan tingkat pendidikan, rendahnya inisiatif sebagian anggota, keterbatasan penggunaan teknologi, serta keterbatasan jejaring dengan pihak luar.

Dalam konteks Pendidikan Luar Sekolah, kelompok pemberdayaan KPM dapat dipahami sebagai ruang belajar masyarakat yang berlangsung secara kontekstual dan partisipatif. Pemberdayaan merupakan proses memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat melalui peningkatan kemampuan mengambil keputusan dan mengelola sumber daya (Mustanir et al., 2023). Karena itu,

pendamping PKH tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran, penghubung sumber daya, pemberi dukungan, dan penguat kapasitas kelompok.

Penelitian terdahulu memperlihatkan pentingnya pendampingan dalam pengembangan kapasitas KPM. Januaris et al., (2025) menunjukkan bahwa pendampingan PKH dapat mendorong kemandirian keluarga melalui peningkatan akses terhadap peluang ekonomi produktif. Komarawati et al., (2025) menekankan pentingnya dukungan teknis dan sosial dalam membangun kapasitas adaptif keluarga penerima bantuan. Dalam kegiatan P2K2, proses pembelajaran yang dilakukan secara rutin juga dapat meningkatkan pengetahuan penerima manfaat mengenai pendidikan, kesehatan, pengasuhan, ekonomi keluarga, dan kesejahteraan sosial (Sinaga, 2021; Umasugi et al., 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas peran pendamping menjadi unsur penting dalam proses pemberdayaan.

Penelitian ini menggunakan teori peran pendamping menurut Nasdian (2015), yang membagi peran pendamping pengembangan masyarakat ke dalam peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknikal. Keempat peran tersebut dipandang relevan untuk menganalisis proses pendampingan karena mencakup partisipasi anggota, pembelajaran, akses sumber daya, advokasi, perencanaan, pengelolaan program, dan pengawasan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendamping PKH dalam pengembangan kapasitas Kelompok Pemberdayaan KPM di Desa Liang Bua serta mengidentifikasi dampak, faktor pendukung, dan hambatan yang menyertainya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada lima kelompok pemberdayaan KPM di Desa Liang Bua, yaitu kelompok PKH Golo Pau, Mata Leso Langke, Todo Langke, Ara Langke, dan Tasok Langke. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada 5–15 Mei 2026. Studi kasus

dipilih karena penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pendamping PKH dalam konteks alami kelompok pemberdayaan (Abdussamad, 2021).

Informan penelitian berjumlah 16 orang, terdiri atas satu pendamping PKH sebagai informan utama dan 15 anggota Kelompok Pemberdayaan KPM sebagai informan pendukung. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap kegiatan pendampingan. Data primer diperoleh melalui observasi yang dilakukan sebanyak 1 kali pada setiap kelompok dan wawancara juga dilakukan 1 kali pada setiap informan penelitian dengan pendekatan semi-terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Dokumentasi meliputi laporan kegiatan, laporan keuangan, modul pembelajaran, daftar hadir, dan foto kegiatan kelompok. Pedoman observasi dan wawancara disusun berdasarkan indikator-indikator yang diambil dari teori yang digunakan dalam melihat peran pendamping di desa Liang Bua. Setelah dibuat, pedoman observasi dan wawancaranya diperiksa dan dicek oleh dosen pembimbing dan penguji pada sesi bimbingan dan ujian proposal berlangsung dan dinyatakan valid serta sesuai untuk menggali data dan informasi terkait peran pendamping di desa Liang Bua. Akan tetapi, pedoman observasi dan wawancaranya masih bersifat sementara dan dapat berubah atau ada penambahan pada saat turun ke lapangan dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pada saat penggalan data berlangsung.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2013). Data direduksi berdasarkan fokus peran pendamping sebagai fasilitator, edukator, representatif, dan teknikal, kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan kategorisasi tema. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi pendamping,

anggota KPM, dan dokumen, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Andarusni Alfansyur & Mariyani, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH menjalankan empat peran dalam pengembangan kapasitas kelompok KPM, yaitu fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknikal. Pada peran fasilitatif, pendamping memberikan motivasi, melakukan mediasi, membangun konsensus, menyediakan fasilitas pendukung, serta mendorong pemanfaatan potensi lokal. Pendampingan tersebut dirasakan oleh anggota KPM dengan meningkatnya partisipasi dan kohesi antaranggota kelompok. Pada peran edukatif, pendamping melaksanakan P2K2, kegiatan pembelajaran, dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri anggota. Pada peran representatif, pendamping membantu membuka akses terhadap sumber daya, melakukan advokasi, dan memfasilitasi pertukaran pengalaman sehingga jejaring dan akses kelompok menjadi lebih luas. Sementara itu, pada peran teknikal, pendamping melakukan analisis kebutuhan, membantu perencanaan kegiatan, serta mendampingi administrasi dan pengelolaan keuangan kelompok sehingga pengelolaan kelompok menjadi lebih tertib dan transparan.

Tabel 1. Ringkasan Peran Pendamping dan Temuan Utama

Peran	Bentuk Pendampingan	Hasil Utama
Fasilitatif	Motivasi, mediasi, konsensus, fasilitas, potensi lokal	Partisipasi dan kohesi kelompok menguat
Edukatif	P2K2, pembelajaran, pelatihan keterampilan	Pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri meningkat
Representatif	Akses sumber daya, advokasi,	Jejaring dan akses

	pertukaran pengalaman	kelompok meluas
Teknikal	Analisis kebutuhan, perencanaan, administrasi, keuangan	Pengelolaan kelompok lebih tertib dan transparan

Peran Fasilitatif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH berperan aktif dalam membangkitkan motivasi anggota kelompok untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan. Peran tersebut terlihat melalui upaya pendamping dalam memberikan dorongan psikologis, membangun kesadaran pentingnya kehadiran dalam pertemuan kelompok, serta menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Jim Ife dan Frank Tesoriero dalam (Puspitasari et al., 2019) yang menegaskan bahwa semangat social merupakan komponen penting dalam proses pengembangan kapasitas yang didalamnya memuat suatu peran untuk memfasilitasi. Hal tersebut bertujuan untuk menstimulasi, menginspirasi, hingga mampu menggerakkan dan memotivasi orang lain untuk ikut terlibat aktif dalam berbagai proses pengembangan kapasitas yang ada di masyarakat.

Jika dianalisis lebih mendalam, fungsi animator yang dijalankan pendamping tidak hanya sebatas mengajak anggota hadir dalam kegiatan, tetapi juga berupaya mengubah pola pikir anggota dari posisi sebagai penerima bantuan pasif menjadi individu yang mampu berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan. Pendamping menggunakan pendekatan motivasional melalui perumpamaan sosial seperti "sapu lidi" yang menggambarkan pentingnya solidaritas kelompok. Strategi tersebut menunjukkan bahwa proses pendampingan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif program, tetapi juga menyentuh dimensi afektif dan psikologis anggota kelompok.

Temuan ini sejalan dengan teori Nasdian (2015) yang menyatakan bahwa fasilitator berfungsi sebagai animator yang mampu menggerakkan masyarakat agar

terlibat dalam proses perubahan sosial. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, motivasi merupakan modal awal yang menentukan keberhasilan partisipasi kelompok dalam setiap program pengembangan kapasitas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fungsi animator yang dilakukan pendamping bukan hanya meningkatkan kehadiran anggota dalam kelompok, tetapi juga membangun kesadaran kolektif yang menjadi fondasi pengembangan kapasitas kelompok pemberdayaan.

Peran sebagai *Negosiator*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat yang muncul dalam kelompok. Pendamping memberikan ruang kepada anggota untuk menyampaikan aspirasi, mendengarkan setiap pendapat secara terbuka, serta membantu kelompok menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Mustanir et al., 2023) yang menegaskan bahwa pendamping pemberdayaan masyarakat juga harus memenuhi syarat kompetensi dalam pendampingannya salah satunya adalah mampu mengelola konflik dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh anggota kelompoknya.

Secara analitis, kemampuan negosiasi pendamping menjadi faktor penting dalam menjaga kohesi kelompok. Kelompok pemberdayaan yang terdiri dari individu dengan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan karakter yang berbeda. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, pendamping berfungsi sebagai penengah yang menjaga keseimbangan hubungan antaranggota. Hal ini didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Foroughi et al., 2023) yang menjelaskan bahwa proses pemberdayaan yang efektif membutuhkan ruang dialog yang inklusif, pengambilan keputusan partisipatif dan pengelolaan konflik yang baik.

Menurut Nasdian (2015), fasilitator memiliki peran sebagai mediator dan negosiator yang bertugas membantu masyarakat menemukan kesepakatan melalui proses dialog. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping telah menjalankan fungsi tersebut dengan cukup efektif melalui pendekatan partisipatif dan musyawarah.

Peran sebagai Pemberi Dukungan (Supporter)

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dukungan yang diberikan pendamping tidak hanya berupa dukungan moral, tetapi juga dukungan material dan administratif. Pendamping membantu anggota mengurus dokumen, mengakses layanan program, membantu pemasaran produk, hingga menyediakan kebutuhan pendukung kegiatan kelompok. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian (Komarawati et al., 2025) yang menyatakan bahwa pendamping PKH berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui dukungan teknis dan sosial dalam memperkuat perilaku ekonomi KPM, khususnya dalam mengelola bantuan untuk usaha. Selain itu penelitian yang dilakukan (Ishom et al., 2021; Wulandari et al., 2025) yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan, pendamping berfungsi membantu kelompok menerima program, memecahkan masalah, membangun kerja sama dengan berbagai pihak, dan membuka akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk penguatan kapasitas. Selain itu dukungan yang diberikan juga dapat berupa bantuan sosial, penguatan kelembagaan, dukungan fasilitas, pelatihan teknis, pengembangan usaha bersama, dan penguatan modal sosial seperti kepercayaan, partisipasi, komunikasi, dan jejaring usaha yang menopang kemandirian KPM.

Dalam perspektif pemberdayaan, dukungan tersebut menunjukkan bahwa pendamping menjalankan fungsi enabling sebagaimana dijelaskan oleh Nasdian (2015). Pendamping berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan anggota kelompok

mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.

Peran Edukatif

Menurut Nasdian (2015), peran edukator merupakan peran pendamping dalam membantu masyarakat memperoleh pengetahuan, meningkatkan kesadaran, mengembangkan sikap kritis, dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian. Dalam perspektif pengembangan masyarakat, edukasi bukan sekadar transfer informasi, melainkan proses pembelajaran yang memungkinkan masyarakat memahami kondisi yang dihadapi, mengidentifikasi potensi yang dimiliki, serta mengambil keputusan secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Liken et al., 2025) yang mengatakan bahwa efektivitas peran tersebut semakin kuat ketika komunikasi pendamping disampaikan secara sederhana, kontekstual, berulang, dan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan serta sosial KPM sehingga mendorong partisipasi aktif, peningkatan keterampilan, dan perubahan perilaku.

Berdasarkan hasil penelitian, peran edukator yang dijalankan pendamping PKH di Desa Liang Bua diwujudkan melalui tiga aspek utama, yaitu penyadaran anggota, kegiatan pembelajaran, dan peningkatan keterampilan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu proses pengembangan kapasitas yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kelompok pemberdayaan KPM.

Penyadaran Anggota

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyadaran anggota dilakukan secara konsisten melalui kegiatan pertemuan kelompok yang dilaksanakan setiap bulan. Dalam kegiatan tersebut, pendamping menyampaikan berbagai informasi mengenai pendidikan, kesehatan, stunting, pengelolaan ekonomi keluarga, serta tujuan dan manfaat kelompok pemberdayaan. Pendamping tidak hanya menyampaikan informasi

administratif mengenai PKH, tetapi juga berupaya membangun pemahaman anggota mengenai pentingnya perubahan perilaku dalam kehidupan keluarga. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Marrison (2001) dalam (Amboningtyas, 2018) yang mengatakan bahwa *capacity building* merupakan suatu proses pembelajaran yang berangkat dari adanya kebutuhan untuk memperoleh pengalaman, mengurangi ketidaktahan dan ketidakpastian dalam kehidupan, serta mengembangkan kemampuan yang diperlukan agar individu maupun kelompok mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Sinaga, 2021; Umasugi et al., 2024) yang mengatakan bahwa P2K2 yang dilakukan setiap bulan diberikan melalui pendidikan nonformal yang membahas tentang kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan pencegahan stunting.

Temuan ini terlihat dari pernyataan informan LE yang menyatakan bahwa dirinya mengajak masyarakat untuk bergabung dalam kelompok, memberikan penjelasan mengenai manfaat kegiatan, serta memberikan ilmu yang dapat menjadi panduan anggota dalam mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyadaran yang dilakukan tidak berhenti pada tahap penyampaian informasi, tetapi diarahkan pada pembentukan pemahaman dan kesadaran anggota terhadap pentingnya keterlibatan dalam kegiatan kelompok.

Dalam perspektif teori Nasdian (2015), kondisi tersebut menunjukkan adanya fungsi edukatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap masalah dan potensi yang mereka miliki. Pendamping berperan sebagai agen perubahan yang membantu anggota memahami bahwa bantuan sosial bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian keluarga.

Hal ini tampak jelas dalam pernyataan informan LT yang menjelaskan bahwa

pembentukan UBSP bertujuan agar anggota tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan memiliki alternatif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang anggota dari orientasi bantuan menuju orientasi kemandirian. Perubahan cara pandang tersebut merupakan indikator penting dalam proses pemberdayaan karena menunjukkan terjadinya transformasi kesadaran yang menjadi fondasi bagi perubahan perilaku sosial dan ekonomi.

Kegiatan Pembelajaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dalam kelompok dilakukan secara teratur melalui pertemuan bulanan yang menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pendamping menyampaikan materi secara lisan dengan menggunakan bahasa Manggarai agar lebih mudah dipahami oleh anggota kelompok. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Januaris et al., 2025) yang menekankan bahwa pentingnya pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dari subjek belajar.

Penggunaan bahasa daerah dalam proses pembelajaran merupakan temuan yang menarik karena menunjukkan adanya penyesuaian metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Sebagian besar anggota kelompok memiliki latar belakang pendidikan yang relatif rendah sehingga penggunaan bahasa lokal menjadi strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang berlangsung tidak bersifat satu arah. Pendamping memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan pengalaman yang mereka miliki. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Januaris et al., 2025) yang menyatakan bahwa pendampingan yang partisipatif, kontekstual, dan terintegrasi dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi KPM untuk bisa mandiri secara ekonomi maupun sosial.'

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung telah menerapkan prinsip andragogi, yaitu pembelajaran orang dewasa yang menempatkan pengalaman peserta sebagai sumber belajar utama dan berorientasi pada pemecahan masalah (Clair, 2024). Dalam pendekatan ini, anggota kelompok tidak hanya menerima informasi dari pendamping, tetapi juga belajar dari pengalaman sesama anggota kelompok.

Peran Representatif

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, pendamping tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator dan edukator, tetapi juga sebagai representatif atau utusan yang mewakili kepentingan kelompok dalam berinteraksi dengan berbagai pihak eksternal. Nasdian (2015) menjelaskan bahwa peran representatif mencakup kemampuan pendamping untuk menghubungkan masyarakat dengan sumber daya di luar komunitas, melakukan advokasi terhadap kebutuhan masyarakat, membangun jejaring kerja, serta memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman yang dapat memperkuat kapasitas kelompok.

Peran ini menjadi penting karena kelompok masyarakat miskin umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, jaringan kelembagaan, maupun sumber daya pembangunan. Dalam kondisi tersebut, pendamping berfungsi sebagai penghubung yang membantu kelompok menjangkau berbagai peluang yang sebelumnya sulit diakses secara mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran representatif pendamping PKH di Desa Liang Bua diwujudkan melalui tiga bentuk utama, yaitu akses terhadap sumber daya eksternal, advokasi, serta pertukaran informasi dan pengalaman.

Akses terhadap Sumber Daya Eksternal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH secara aktif berperan sebagai penghubung antara kelompok pemberdayaan KPM dengan berbagai lembaga eksternal, khususnya pemerintah desa, Dinas Pertanian, dan Dinas Koperasi.

Pendamping tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kebutuhan kelompok kepada instansi terkait, tetapi juga melakukan koordinasi dan komunikasi yang memungkinkan kelompok memperoleh dukungan nyata berupa bantuan bibit sayuran dan berbagai bentuk dukungan lainnya. Hal ini didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sahab et al., 2025) yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam pemberdayaan kelompok.

Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas kelompok pemberdayaan tidak berkembang secara alamiah, melainkan melalui proses intervensi sosial yang dilakukan pendamping dalam membuka akses terhadap sumber daya pembangunan. Bantuan bibit yang diperoleh kelompok bukan sekadar bantuan material, tetapi merupakan hasil dari kemampuan pendamping membangun hubungan kelembagaan dengan pihak eksternal.

Dalam perspektif teori Nasdian (2015), kemampuan mengakses sumber daya eksternal merupakan salah satu indikator utama keberhasilan peran representatif. Pendamping bertindak sebagai broker sosial yang menghubungkan kelompok dengan sistem sumber yang berada di luar komunitas. Peran ini menjadi sangat penting karena sebagian besar anggota kelompok berasal dari keluarga penerima manfaat yang memiliki keterbatasan modal ekonomi, sosial, dan informasi.

Hal ini menunjukkan bahwa bantuan bibit yang diperoleh kelompok memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan sarana produksi. Bantuan tersebut dapat meningkatkan motivasi anggota untuk mengembangkan kegiatan kelompok serta memperkuat keyakinan bahwa kelompok mereka mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Dengan kata lain, akses terhadap sumber daya eksternal tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan modal sosial kelompok.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua usulan kelompok memperoleh respons yang cepat

dari lembaga terkait. Beberapa usulan mengenai bantuan alat pertanian dan benih belum mendapatkan tindak lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan akses terhadap sumber daya eksternal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pendamping, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas dan kebijakan lembaga yang menjadi mitra kelompok.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran representatif pendamping dalam mengakses sumber daya eksternal telah memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kapasitas kelompok, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural di luar kelompok.

Advokasi

Advokasi merupakan proses memperjuangkan kebutuhan, kepentingan, dan hak-hak masyarakat agar memperoleh perhatian dari pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, advokasi tidak hanya berarti menyampaikan aspirasi kelompok, tetapi juga memastikan bahwa kelompok memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses berbagai program pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH secara aktif menjalankan fungsi advokasi melalui berbagai upaya, seperti menyampaikan kondisi kelompok kepada Dinas Pertanian, mengusulkan tambahan modal kepada Kementerian Sosial, membantu masyarakat memperoleh bantuan PKH, serta memperjuangkan bantuan kursi roda bagi anggota yang mengalami stroke. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Umasugi et al., 2024) yaitu pendamping juga membantu memfasilitasi anggota dalam akses ke program komplementer, verifikasi layanan, pembaruan data, dan pertemuan peningkatan kapasitas keluarga.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendamping tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pembela kepentingan kelompok. Dalam praktiknya, pendamping menjadi saluran

komunikasi yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan lembaga pengambil kebijakan.

Peran Teknikal

Peran teknis merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki seorang pendamping masyarakat dalam proses pemberdayaan. Menurut Nasdian (2015), peran teknis mencakup kemampuan melakukan analisis kebutuhan, menyusun perencanaan, mengelola program, memanfaatkan teknologi dan informasi, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), kemampuan teknis pendamping menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas proses pendampingan karena berhubungan langsung dengan kemampuan mengidentifikasi masalah, merancang solusi, mengorganisasi kegiatan, dan memastikan keberlanjutan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH di Desa Liang Bua telah menjalankan berbagai fungsi teknis dalam pengembangan kapasitas kelompok pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meskipun demikian, tingkat pelaksanaan setiap fungsi menunjukkan karakteristik yang berbeda, baik dari sisi intensitas maupun dampaknya terhadap kelompok. Penelitian yang dilakukan (Komarawati et al., 2025) mengkonfirmasi bahwa kontribusi teknis pendamping sangat diperlukan dalam membangun kapasitas transformasi dan resiliensi ekonomi keluarga penerima manfaat.

Analisis Kebutuhan Anggota

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping melakukan identifikasi kebutuhan anggota melalui forum pertemuan kelompok. Kebutuhan yang muncul kemudian diprioritaskan berdasarkan kondisi ekonomi, kebutuhan sehari-hari, serta potensi yang dimiliki anggota kelompok. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan kelompok. Hal ini sejalan

dengan prinsip pendekatan berbasis kebutuhan dalam pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Hasdiansyah, 2023) yang menekankan bahwa Pemberdayaan masyarakat perlu dilandaskan pada pemahaman yang komprehensif terhadap kebutuhan, aspirasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang dirancang memiliki tingkat relevansi yang tinggi dan selaras dengan konteks sosial, budaya, serta kondisi lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses analisis kebutuhan yang dilakukan pendamping telah mengarah pada pendekatan partisipatif. Pendamping tidak secara sepihak menentukan kebutuhan anggota, melainkan memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan masalah dan kebutuhan yang mereka alami. Pendekatan ini penting karena kebutuhan masyarakat miskin sering kali bersifat kontekstual dan tidak dapat dipahami hanya melalui asumsi dari pihak luar.

Oleh karena itu, kemampuan pendamping mengidentifikasi kebutuhan anggota merupakan indikator penting dari peran teknis. Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa proses analisis kebutuhan masih berfokus pada kebutuhan ekonomi rumah tangga dan pengelolaan kelompok simpan pinjam. Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis kebutuhan belum sepenuhnya mencakup aspek pengembangan kapasitas yang lebih luas seperti keterampilan kewirausahaan, literasi digital, maupun penguatan kapasitas organisasi kelompok. Dengan demikian, meskipun fungsi analisis kebutuhan telah berjalan, masih terdapat ruang pengembangan agar proses identifikasi kebutuhan menjadi lebih komprehensif. Secara kritis dapat dikatakan bahwa kemampuan pendamping dalam menganalisis kebutuhan telah membantu kelompok menentukan kegiatan yang relevan, tetapi belum sepenuhnya mendorong transformasi kapasitas anggota menuju kemandirian yang lebih berkelanjutan.

Penguasaan Metode Pendampingan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping menggunakan pendekatan dialogis, diskusi kelompok, berbagi pengalaman, serta pemberian contoh nyata dalam setiap kegiatan pendampingan. Pendamping tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi juga melibatkan anggota dalam proses pembelajaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa metode pendampingan yang digunakan telah mencerminkan prinsip pendidikan orang dewasa (andragogi). Dalam pendekatan ini, peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki pengalaman hidup yang dapat dijadikan sumber belajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak berlangsung secara instruktif, tetapi melalui pertukaran pengalaman dan refleksi bersama.

Menurut Nasdian (2015), penguasaan metode pendampingan merupakan bagian penting dari kompetensi teknis karena menentukan kemampuan pendamping dalam memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat. Pendamping yang menguasai metode partisipatif akan lebih mudah membangun kesadaran dan keterlibatan anggota kelompok dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat komando.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa variasi metode pembelajaran yang digunakan masih relatif sederhana. Pendamping belum banyak memanfaatkan media pembelajaran, simulasi, studi kasus, maupun teknik pembelajaran berbasis praktik yang dapat memperkaya pengalaman belajar anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguasaan metode pendampingan sudah baik, tetapi masih dapat ditingkatkan agar proses pengembangan kapasitas menjadi lebih efektif.

Pemanfaatan Teknologi

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi masih terbatas pada fungsi komunikasi. Teknologi belum dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran, pencatatan administrasi kelompok, pemasaran produk, maupun pengembangan usaha ekonomi

anggota. Kondisi ini mengindikasikan bahwa literasi digital kelompok masih relatif rendah. Dengan demikian, peran teknikal pendamping dalam aspek teknologi telah berjalan, tetapi belum optimal dalam mendukung pengembangan kapasitas yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh literasi digital anggota yang masih rendah dan penggunaannya dalam kegiatan pemberdayaan belum diarahkan secara khusus. Teknologi masih sebatas digunakan sebagai alat untuk komunikasi, belum dimanfaatkan untuk pembelajaran, administrasi, pemasaran, dan pengembangan usaha. Selain itu, keterbatasan sarana dan kondisi geografis turut menjadi faktor penghambat.

Perencanaan Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan dilakukan secara bersama melalui forum kelompok. Pendamping berperan mengarahkan proses perencanaan, sedangkan anggota terlibat dalam menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan program telah menerapkan prinsip partisipatif. Keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana kegiatan menjadi indikator penting karena meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Hal ini dibuktikan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Januaris et al., 2025) yang menegaskan bahwa pelibatan KPM dalam perencanaan kegiatan pelatihan membuat peserta merasa memiliki kontrol dan meningkatkan tanggung jawab terhadap hasil pemberdayaan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Kazanskaia, 2025) juga menunjukan bahwa perencanaan yang partisipatif juga membantu komunitas dalam membangun konsensus, merancang aksi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut Nasdian (2015), perencanaan partisipatif merupakan salah satu prinsip utama pemberdayaan masyarakat. Program yang dirancang bersama masyarakat cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan

dan memiliki peluang keberlanjutan yang lebih tinggi. Secara analitis, keterlibatan anggota dalam perencanaan tidak hanya menghasilkan program yang relevan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi anggota dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah secara kolektif.

Dampak, Dukungan, dan Hambatan

Pengembangan kapasitas merupakan proses peningkatan kemampuan individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari perubahan nyata yang dialami peserta melalui proses pembelajaran dan pendampingan. Karena itu, analisis dampak penting untuk menilai sejauh mana kegiatan pendamping PKH mampu membawa perubahan bagi anggota Kelompok Pemberdayaan KPM di Desa Liang Bua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan lebih banyak dirasakan oleh anggota daripada kegagalan atau pengaruh buruknya. Keberhasilan pendampingan tersebut yang dirasakan anggota meliputi peningkatan pengetahuan dan wawasan anggota, bertambahnya keterampilan praktis, perubahan pola pikir dan rasa percaya diri, serta semakin kuatnya kerja sama dan solidaritas antaranggota. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong adanya peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan peningkatan kapasitas keluarga yang dirasakan secara langsung oleh anggota kelompok KPM, karena manfaat pembelajaran diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

Meski demikian, penelitian juga menemukan adanya pengaruh buruk yang meskipun relatif kecil. Beberapa anggota terkadang mengabaikan sementara tugas domestik di rumah karena lebih fokus mengikuti kegiatan kelompok. Namun, kondisi ini tidak menunjukkan kegagalan

program, melainkan konsekuensi dari meningkatnya partisipasi anggota dalam kegiatan pemberdayaan. Secara keseluruhan, manfaat kegiatan pengembangan kapasitas tetap jauh lebih dominan, dengan tantangan yang dapat diatasi melalui manajemen waktu dan dukungan keluarga.

Dukungan dan Hambatan Peran Pendamping dalam Kegiatan Pengembangan Kapasitas

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada kompetensi pendamping dan partisipasi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan program. Dalam konteks pemberdayaan, faktor pendukung menjadi modal penting yang memperkuat pencapaian tujuan, sedangkan hambatan merupakan tantangan yang perlu diatasi agar proses pendampingan dan pengembangan kapasitas anggota Kelompok Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Liang Bua dapat berjalan optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung peran pendamping PKH dalam kegiatan pengembangan kapasitas. Faktor-faktor tersebut meliputi sikap menghargai dan keterbukaan anggota terhadap pendamping, kekompakan serta solidaritas antaranggota kelompok, dan dukungan sumber daya dari pihak eksternal. Ketiga faktor ini membantu menciptakan suasana pendampingan yang kondusif, memperkuat kerja sama kelompok, dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Di sisi lain, peneliti juga menemukan sejumlah faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan dan pengembangan kapasitas anggota. Hambatan tersebut meliputi kondisi psikologis anggota, rendahnya pendidikan dan literasi, persoalan struktural dan manajerial kelompok, keterbatasan ekonomi dan pemasaran, serta hambatan geografis dan sarana. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan semua pihak dalam memanfaatkan faktor

pendukung dan mengatasi berbagai hambatan yang ada.

Dalam mengatasi hambatan yang ada, pendamping tidak hanya menggunakan satu cara yang sama, melainkan menyesuaikan strategi dengan jenis permasalahan yang dihadapi anggota. Hambatan psikologis diatasi melalui motivasi dan pendekatan persuasif, hambatan pendidikan melalui pembelajaran sederhana dan praktik, hambatan manajerial melalui penguatan administrasi dan pengelolaan kelompok, hambatan ekonomi melalui kegiatan pemberdayaan dan akses sumber daya, sedangkan hambatan geografis melalui penyesuaian kegiatan serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pendamping dalam menyesuaikan metode pendampingan dengan kondisi nyata anggota menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengembangan kapasitas kelompok KPM.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping PKH di Desa Liang Bua telah menjalankan peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknikal dalam pengembangan kapasitas Kelompok Pemberdayaan KPM. Peran tersebut diwujudkan melalui penggerakan partisipasi, mediasi dan dukungan anggota, P2K2 dan pelatihan berbasis potensi lokal, pembukaan akses terhadap sumber daya eksternal, pertukaran pengalaman, perencanaan kegiatan, pendampingan administrasi, serta pengawasan keuangan. Pendampingan memberikan dampak positif berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, kerja sama, dan kemandirian ekonomi anggota. Namun, penguatan kapasitas masih perlu diarahkan dari dukungan administratif menuju peningkatan kapasitas manajerial dan transformatif yang lebih berkelanjutan. Perbedaan hasil antar kelompok, termasuk kondisi kas, juga dipengaruhi karakteristik internal seperti usia kelompok, jenis kegiatan, kemampuan pengurus, kedisiplinan, dan keberlanjutan partisipasi.

Karena itu, pendampingan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masing-masing kelompok serta diperkuat melalui jejaring, literasi digital, pemasaran, dan pemantauan yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). Syakir Media Press. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/8793/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Amboningtyas, D. (2018). Pengembangan Capacity Building Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Kecil Menengah Di Kecamatan Tugu, Semarang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1. <https://jurnal.stkipgritlungagung.ac.id/index.php/jupeko/article/view/1042>
- Andarusni Alfansyur, & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/3432>
- Clair, R. S. (2024). *Andragogy: Past and Present Potential*. 2024(184), 7–13. <https://doi.org/10.1002/ace.20546>
- Foroughi, M., Andrade, B. De, Pereira, A., & Wang, T. (2023). Public Participation and Consensus-Building in Urban Planning From the Lens of Heritage Planning: A Systematic Literature Review. *Cities*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104235>
- Hasdiansyah, A. (2023). *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat*. Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteuraka.com/publications/566988/buku-ajar-pemberdayaan-masyarakat>
- Ishom, M., Raharjo, K. M., Avrilianda, D., & Fatihin, M. K. (2021). *The Role of Facilitators in Community Empowerment Based on Learning Community to Improve Vocational Skills*. 609(Icite), 156–159.
- Januaris, W., Ishaq, M., & Purnamasari, I. (2025). Empowerment of Beneficiary Families of the Family Hope Program in Poverty Alleviation through Independent Graduation. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 6(1), 179–193. <https://doi.org/10.37680/amalee.v6i1.6764>
- Kazanskaia, A. N. (2025). Participatory Planning and Decision-Making in Community Development. *Neya Global Studies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.64357/neya-gjnps-prtdvchange-o6>
- Komarawati, K., Nurdin, M. F., Gunawan, W., & Nurwati, R. N. (2025). Transformative capacity to build an adaptive society resilience during crisis: evidence from conditional cash transfer/PKH Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 10, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1507177>
- Liken, E. L., & Octaviani, Vethy, Y. (2025). Effective Communication of Family Hope Program (PKH) Facilitators to Beneficiary Families (KPM): A Study of P2K2 Activities in Kandang Mas Village , Bengkulu City. *Social Sciences Journal*, 2(2), 199–208.
- Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). *Pemberdayaan masyarakat*. PT Global Eksekutif Teknologi. <https://www.scribd.com/document/949583033/Afriansyah-A-2023>
- Nasdian, F. T. (2015). *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/mig8z>
- Puspitasari, D. C., Satriani, R., Pmungkas, S. B., Sosiologi, D., Ilmu, F., Politik, I., & Mada, U. G. (2019). Implementasi Saemaul Undong Di Kabupaten Gunung Kidul Capacity Building Of Participatory Community : Implementation Studi Of

- Saemaul Undong At Gunung Kidul District. *Sosiologi Pendidikan Humanis*, 4(1), 1–13. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jsp/article/view/7896>
- Sahab, A., Aminah, S., Rizky, R., & Wibisono, B. (2025). *Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Kelompok Tani Golo Pandan Desa Watu Lanur Nusa Tenggara Timur*. 04(02), 1–13. <http://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JPPM/article/view/1158> <http://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JPPM/article/download/1158/831>
- Sinaga, R. A. (2021). Communication Patterns Of Social Assistant Program For The Harapan Family In The Activities Of Family Capability Improvement Meetings (P2K2) Beneficiary Family (KPM) Balige District. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences*, 1(1), 78–87.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta. https://doi.org/https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf
- Umasugi, M., Darsan, M., Adam, H., Terbuka, U., & Worker, S. (2024). Increasing Knowledge for Social Assistance Recipients Through Family Development Sessions (FDS) of the Family Hope Program (PKH) in Indonesia. *Ilomata International Social Science*, 5(2), 540–553.
- Wulandari, I., Izana, N. N., & Kartika, A. (2025). Peran Modal Sosial Dalam Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Nirati Binaan PT Arutmin NPLCT. *Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 7(2), 64–76.